

The Efficiency And Effectiveness Of Budget Use In The Library And Archive Office Of Seluma Regency

Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaan Anggaran Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Seluma

Kamelia Astuty¹⁾; Neri Susanti²⁾; Rocky Andreas³⁾

³⁾Study Program of Accounting, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

^{1,2)} Department of Accounting, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ rocky.andreas05@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [31 Agustus 2024]

Revised [28 Oktober 2024]

Accepted [02 November 2024]

KEYWORDS

Efficiency, Effectiveness,
Budget.

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Secara singkat dan dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan beberapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan efisiensi anggaran belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma pada tahun 2019 tingkat efisiensi sebesar 38,92% menjadi 59,65% pada tahun 2020 dalam sudut pandang perubahan efisiensi ini dapat dilihat sebagai penurunan efisiensi namun masih tetap pada interval sangat efisien karena nilai rasion tersebut masih kecil dari 60%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan tingkat efisiensi menjadi 96,07% pada kategori kurang efisien. Namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan rasio efisiensi menjadi 78,28% pada kategori efisien dan terus meningkat pada tahun 2023 sebesar 27,19% pada kategori penilaian tingkat efisiensi. Rata-rata rasio efisien dari tahun 2019 sampai 2023 tingkat rasio efisien pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma diperoleh nilai rata-rata sebesar 60,02 % berada pada tingkat kriteria penilaian efisien karena nilai tersebut terletak pada interval 60%-80%. Efektivitas pengelolaan anggaran belanja langsung pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma pada tahun 2019 sebesar 92,25% yang termasuk dalam kriteria efektif sedangkan pada tahun 2020 tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi 74,51% yang masuk dalam kriteria kurang efektif. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi efektif dengan nilai rasio sebesar 95,93%, tetapi di tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 93,08% tetapi masih pada kriteria penilaian efektif. Pada tahun 2023 rasio efektivitas mengalami peningkatan menjadi 99,12% pada kriteria penilaian lain efektif. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat efektifitas anggaran belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma dapat dikatakan efektif karena nilai rata-rata dari tahun 2019 sampai 2023 sebesar 90,98% pada kategori efektif.

ABSTRACT

In brief, public budgeting can be described as a financial plan that outlines various costs related to the plans made (expenditures) and how much and in what way to obtain money to fund those plans (revenue). The purpose of this research is to determine the efficiency and effectiveness of budget use in the Library and Archive Office of Seluma Regency. The analysis method used in this study is descriptive method. The results of the study show that the spending efficiency of the office in 2019 had an efficiency level of 38.92%, which increased to 59.65% in 2020. From the perspective of this efficiency change, it can be seen as a decrease in efficiency, but it remains in the very efficient interval since the ratio value is still below 60%. In 2021, the efficiency level decreased to 96.07%, categorized as less efficient. However, in 2022, the efficiency ratio increased to 78.28%, categorized as efficient, and continued to rise in 2023 by 27.19% in the efficiency level assessment category. The average efficiency ratio from 2019 to 2023 for the office is 60.02%, which is categorized as efficient as it falls within the 60%-80% interval. The effectiveness of direct spending budget management in the office in 2019 was 92.25%, falling into the effective criteria, while in 2020, the effectiveness level decreased to 74.51%, categorized as less effective. In 2021, it increased to an effective level with a ratio value of 95.93%, but in 2022, it decreased again to 93.08%, still within the effective assessment criteria. In 2023, the effectiveness ratio increased to 99.12%, categorized as effective. It can be concluded that the average effectiveness level of the budget spending in the Library and Archive Office of Seluma Regency can be considered effective because the average value from 2019 to 2023 is 90.98%, which is in the effective category.

PENDAHULUAN

Setelah era reformasi, paradigma mengalami perubahan dari paradigma pertumbuhan menjadi paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang yang ada di masing-masing elemen daerah yaitu masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD. Reformasi sektor publik tersebut

menyebabkan bidang pengelolaan keuangan negara dalam aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan (Trisnawati, Burhanuddin dan Ferina, 2019:87). Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga bisa diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Bagi pemerintah anggaran adalah sangat penting, sebagai otoritas pelaksanaan, sebagai alat pengawasan, alat kontrol dan pengendalian pemerintah dan pertanggungjawaban. APBN dan APBD memerlukan persetujuan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat, yang setelah disetujui kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Sementara untuk organisasi bisnis adalah sangat fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan lingkungan dan ekonomi yang terjadi. Sedangkan menurut Mardiasmo (2020:77) anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Secara singkat dan dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan beberapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan). Pentingnya anggaran publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Suatu organisasi atau instansi membuat anggaran karena anggaran memiliki peranan yang penting dan juga sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Anggaran merupakan rancangan awal yang disusun secara sistematis, dimana setiap rancangan atau rencana menunjukkan mengenai apa yang dilakukan organisasi di masa yang akan datang serta memberikan manfaat dalam mencapai tujuan organisasi. Sehingga setiap organisasi diharapkan dapat memperhatikan dan meningkatkan kinerja dengan *value for money* yaitu secara efektif dan efisien.

Efektivitas tidak menyatakan tentang besar biaya yang telah dikeluarkan, tetapi lebih melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kurniasari, Kurniasari dan Marta (2019:65) efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Menurut Mahsun (2020:55) efisiensi berhubungan dengan metode operasi (*method operation*). Apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya, maka proses kegiatan operasional tersebut dapat dikatakan efisien. Efisiensi sangat penting dalam pengukuran atau perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan serta terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai.

Efisiensi adalah terkait hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma memiliki tugas pokok bidang pengolahan, layanan, pelestarian bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca serta pengelolaan kearsipan juga perlindungan, penyelamatan, dan perizinan penggunaan arsip. Adapun fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma adalah Pelaksanaan pengolahan, layanan, pelestarian bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan serta perlindungan, penyelamatan, dan perizinan penggunaan arsip. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. Fenomena dalam penelitian ini didasarkan pada kenyataan yang terjadi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma dapat dilihat belum efisiennya karena realisasi anggaran belanja langsung belum dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, hal ini dapat disebabkan karena ada beberapa program yang telah direncanakan namun tidak berhasil dilaksanakan sehingga tujuan organisasi belum tercapai. Hal ini juga disebabkan oleh Sumber Daya Manusia yang tidak memiliki kompetensi yang memadai menduduki jabatan penting, sehingga seringkali lalai dengan tanggungjawab terhadap realisasi anggaran.

Begitu juga dengan efektifitas juga dapat dibidang belum efektif karena dimana secara umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma belum mencapai penyerapan anggaran 100 persen karena masih terdapat sisa dari anggaran belanja tiap tahun. Tidak terealisasinya anggaran ini



disebabkan oleh beberapa faktor penyebab diantaranya lambatnya penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan, proses administrasi perjanjian kerjasama dengan pemborong yang membutuhkan waktu, lemahnya perencanaan yang sering memakan waktu lama dan menyebabkan keterlambatan pada pengesahannya menjadikan target realisasi anggaran tidak tercapai, perencanaan anggaran yang kurang tepat akan menyulitkan dalam hal pembahasan anggaran, pelaksanaan anggaran tidak dipahami dengan baik. Terkait hal tersebut, peneliti tertarik mengangkat judul dari fenomena tersebut dimana laporan realisasi anggaran mencerminkan suatu kinerja instansi pemerintah dalam hal pengelolaan anggaran.

Sebagai SKPD pengguna anggaran, telah berusaha melakukan berbagai strategi untuk memaksimalkan kinerja dalam hal perencanaan dan pengelolaan anggaran yang sudah direncanakan agar bisa berjalan efektif dan efisien. Namun, hal tersebut tidak serta merta menjadikan pencapaian yang maksimal, hal ini bisa dilihat dengan setiap tahunnya masih terdapat sisa dari anggaran yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Menurut Pengamatan lapangan, pelaksanaan anggaran dirasakan belum efektif dan efisien, hal ini didasarkan pada program kegiatan yang dananya tidak dapat terserap hingga 100 %.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Pemerintah

Menurut Mentu & Sondakh (2021:67) akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi Pemerintahan mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan. Fungsi akuntansi pemerintah adalah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat meliputi aspek kepengurusan administrasi pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pramudiana dalam (Khanifiyah, 2022:25) mengatakan akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil dari proses yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut maka berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut digunakan menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Daerah. Pengertian keuangan daerah menurut Penjelasan Umum Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sebagaimana keuangan negara, keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang inventaris milik daerah, sedangkan yang termasuk dalam keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Anggaran

Anggaran adalah suatu alat perencanaan dan pengendalian yang efektif di dalam organisasi, yang bersifat jangka pendek biasanya mencakup periode satu tahun (Radja, 2023:105). Sedangkan Supriyono (2020:39) mengungkapkan bahwa anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan akan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun. Kegiatan penyusunan anggaran ini dinamakan penganggaran. Anggaran memiliki dua peran penting di dalam sebuah organisasi, yaitu pertama berperan sebagai alat perencanaan dan kedua berperan sebagai alat pengendalian. Sebagai sebuah rencana tindakan, anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan organisasi atau unit organisasi dengan cara membandingkan hasil yang sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika hasil yang sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang

telah ditetapkan. Jika hasil sesungguhnya berbeda secara signifikan dari rencana, tindakan tertentu harus diambil untuk melakukan revisi yang perlu terhadap rencana.

Rasio Efisiensi

Pemendagri 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 1 tentang Azas Umum Pengelolaan Daerah dinyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan tanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Khusus untuk efisiensi dijelaskan lebih lanjut bahwa efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Menurut Mahmudi (2019:66) menjelaskan bahwa efisiensi adalah terkait hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Sedangkan menurut Mardiasmo (2020:112) menjelaskan bahwa efisiensi merupakan output tertentu yang dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya. Menurut Dedi dan Ayuningtyas (2020:49) menjelaskan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan. Suatu organisasi, kegiatan atau program dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan dari sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma.

Rasio Efektivitas

Menurut Ravianto (2021:78) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Menurut Bungkaes (2022:101) efektivitas adalah merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud mengenai "Efektivitas". Bagaimana pun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya: (1). Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya; (2). Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi:

Rasio Efisiensi

Mahsun (2020:98) menjelaskan bahwa pengukuran efisiensi mengukur perbandingan tingkat output dengan tingkat input dari organisasi sektor publik. Adapun rumus rasio efisiensi adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas

Mardiasmo (2020:122) menjelaskan bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Adapun rumus rasio efektivitas adalah:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efisiensi Penggunaan Anggaran Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Seluma

Pengukuran rasio efisiensi dalam pelaksanaan realisasi anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma yang digunakan adalah membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan anggaran belanja dikali 100%. Adapun rumus yang digunakan untuk melihat efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

Adapun data realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Anggaran Belanja Langsung	Realisasi anggaran belanja langsung	Anggaran	Realisasi anggaran
1	2019	1.542.805.000	1.371.796.900	3.820.345.244	3.524.321.208
2	2020	1.753.937.000	1.431.886.900	3.221.797.850	2.400.447.133
3	2021	2.965.980.300	2.792.965.241	3.030.640.241	2.907.161.718
4	2022	2.436.934.700	2.127.629.618	2.920.138.618	2.717.925.793
5	2023	4.187.389.300	3.844.201.130	14.264.804.130	14.139.265.366

Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka akan disajikan hasil perhitungan rasio efisiensi dalam pelaksanaan realisasi anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma untuk tahun 2019 s/d tahun 2023 yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 2 Hasil Rasio Efisiensi

No	Tahun	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
1	2019	38.92	Sangat Efisien
2	2020	59.65	Sangat Efisien
3	2021	96.07	Kurang Efisien
4	2022	78.28	Efisien
5	2023	27.19	Sangat Efisien
	Rata-Rata	60,02	Efisien

Efektivitas Penggunaan Anggaran Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Seluma

Efektivitas adalah kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dengan anggaran belanja yang di targetkan. Kinerja pemerintah dikategorikan efektif dengan melihat rasio tingkat efektivitas yang telah di tentukan. Jika rasio kurang dari 60% maka kinerja pemerintah di katakan tidak efektif, rasio antara 60% sampai dengan 80% kinerja pemerintah dikatakan kurang efektif, rasio antara 80% sampai dengan 90% rasio dinilai cukup efektif, rasio antara 90% sampai dengan 100% rasio dinilai efektif dan apabila rasio lebih dari 100% maka rasio dinilai sangat efektif. Semakin besar rasio efektif maka semakin bagus kinerja pemerintah. Pengukuran rasio efektivitas dalam pelaksanaan realisasi anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma yang digunakan adalah membandingkan realisasi anggaran dengan target anggaran dikali 100%. Adapun rumus yang digunakan untuk melihat fektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Adapun data realisasi anggaran dan target anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Data Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2019-2023 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Realisasi Anggaran	Target Anggaran
1	2019	3.524.321.208	3.820.345.244
2	2020	2.400.447.133	3.221.797.850
3	2021	2.907.161.718	3.030.640.241
4	2022	2.717.925.793	2.920.138.618
5	2023	14.139.265.366	14.264.804.130

Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka akan disajikan hasil perhitungan rasio efektivitas dalam pelaksanaan realisasi anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma untuk tahun 2019 s/d tahun 2023 yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4 Hasil Rasio Efektivitas

No	Tahun	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
1	2019	92.25	Efektif
2	2020	74.51	Kurang Efektif
3	2021	95.93	Efektif
4	2022	93.08	Efektif
5	2023	99.12	Efektif
	Rata-rata	90,98	Efektif

Berdasarkan hasil persentase rasio efisiensi yang diperoleh dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma dapat dikatakan mengalami fluktuasi atau adanya kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Efisiensi merupakan pengukuran kinerja suatu organisasi dengan membandingkan antara output dengan input untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan yang dinilai dari besarnya sumber daya atau biaya. Adanya perubahan hasil persentase efisiensi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma dapat terjadi karena perubahan pada jumlah realisasi anggaran belanja langsung terhadap realisasi anggaran belanja. Dengan diperolehnya kriteria efisien, dapat diartikan bahwa tercapainya realisasi anggaran belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma tidak melebihi ketentuan dari kriteria efisiensi yang telah ditetapkan, walaupun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma membutuhkan dana yang besar untuk menjalankan program.

Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani perpustakaan dan kearsipan, sehingga memiliki pengeluaran yang banyak dan membutuhkan anggaran yang besar untuk memenuhi tugas dan fungsi pada program yang sudah ditetapkan, serta pendapatan yang diperoleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma tidak digunakan sebagai belanja untuk keperluan pelaksanaan program, sehingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma dalam melakukan kegiatan bergantung pada anggaran dari Pemerintah. Hasil penelitian sesuai dengan teori Mahmudi (2019:66) menjelaskan bahwa efisiensi adalah terkait hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis rasio efektivitas tersebut, dapat dikatakan adanya kenaikan dan penurunan perubahan anggaran dan realisasinya pada setiap tahunnya. Efektivitas merupakan pengukuran kinerja suatu organisasi dari hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai sesuai dengan target kebijakan. Adanya perubahan pada jumlah anggaran belanja dan realisasinya yang berkaitan dengan *outcome* dapat terjadi karena beberapa faktor seperti perubahan dari jumlah anggaran belanja daerah yang dianggarkan oleh Pemerintah untuk belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan untuk belanja modal. Dengan adanya perbedaan anggaran dan realisasi pada setiap tahunnya maka akan memperoleh sisa anggaran, hal tersebut dapat menunjukkan penyerapan anggaran yang menggambarkan kinerja organisasi dalam hal memberikan pelayanan publik. Maka dari itu pada jumlah anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja daerah tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan program dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Oleh karena itu, dari sisa anggaran tersebut seharusnya dapat digunakan untuk mengembangkan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan para pihak, tetapi baru bisa digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. Hasil penelitian sesuai dengan teori Ravianto (2021:78) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan



keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Efisiensi anggaran belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma pada tahun 2019 tingkat efisiensi sebesar 38,92% menjadi 59,65% pada tahun 2020 dalam sudut pandang perubahan efisiensi ini dapat dilihat sebagai penurunan efisiensi namun masih tetap pada interval sangat efisien karena nilai rasion tersebut masih kecil dari 60%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan tingkat efisiensi menjadi 96,07% pada kategori kurang efisien. Namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan rasio efisiensi menjadi 78,28% pada kategori efisien dan terus meningkat pada tahun 2023 sebesar 27,19% pada kategori penilaian tingkat efisiensi. Rata-rata rasio efisien dari tahun 2019 sampai 2023 tingkat rasio efisien pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma diperoleh nilai rata-rata sebesar 60,02 % berada pada tingkat kriteria penilaian efisien karena nilai tersebut terletak pada interval 60%-80%
2. Efektivitas pengelolaan anggaran belanja langsung pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma pada tahun 2019 sebesar 92,25% yang termasuk dalam kriteria efektif sedangkan pada tahun 2020 tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi 74,51% yang masuk dalam kriteria kurang efektif. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi efektif dengan nilai rasio sebesar 95,93%, tetapi di tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 93,08% tetapi masih pada kriteria penilaian efektif. Pada tahun 2023 rasio efektivitas mengalami peningkatan menjadi 99,12% pada kriteria penilaian efektif. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat efektifitas anggaran belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma dapat dikatakan efektif karena nilai rata-rata dari tahun 2019 sampai 2023 sebesar 90,98% pada kategori efektif.

Saran

Dilihat dari hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menghindari terjadinya ketidakefektifitasan anggaran yang telah dialokasikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma diharapkan sebaiknya dalam penyerapan anggaran belanja yang dilakukan lebih ditingkatkan lagi secara maksimal dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan agar tidak terjadi selisih antara realisasi dan anggarannya yang tinggi, sehingga dapat tercapainya tujuan dan sasaran.
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma memperhatikan dan memperhitungkan rencana secara seksama agar anggaran dapat direalisasikan dengan baik dan dapat telaksana sesuai visi dan misi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaad, 2019. *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Bogor: Azkia Publishing
- Amalia, A. F. 2019. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017*. Diponegoro Journal of Accounting, 8(2), 1–13.
- Amelinda, A., Situmorang, 2022. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok*. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Vol. 8 No. 2 , T
- Anthony, R., Vijay Govindarajan, 2021, *Management Control System*, Jilid I dan II, Terjemahan Kurniawan Tjakrawala dan Krista, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Bastian, Indra. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai. 2022. *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Acta Diurna.
- Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2020. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Fitria, F., Tampubolon, G. A. P., & Aulina, P. 2022. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten Labuhan Batu Utara 2016–2020*. Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA), 3(2), 740–749.
- Halim, Abdul. 2019. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat
- Julita dan Jufrizen, 2020. *Budgeting*. Penerbit Citapustaka Media Perintis. Bandung

- Khanifiyah, Ulfi. 2022. *Analisis Implementasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Psap No. 07 Berdasarkan Pp No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pmptsp Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Kurniasari, Dewi, Dedeh Kurniasari & Marta. 2019. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2 (2)
- Lisnasari, L., Guasmin, G., & Haryani, S. 2022. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu*. Jurnal Kolaboratif Sains, 5(2), 89-95.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. edisi kedua. UPP STIM YKPN
- Mahsun, Mohamad. 2020. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama*. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta
- Maidar, M., & Rosalia, H. 2022. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kominikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2020*. Jurnal Serambi Akademica, 10(6), 588-594.
- Mardiasmo. 2020. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. 2021. *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov. Sulut*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4(1).
- Radja, M. J. 2023. *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pada Kantor Gabungan Dinas Kota Makassar*. Insan Cita Bongaya Research Journal, 102-110.
- Ravianto J. 2021. *Produktivitas dan Pengukuran*, Jakarta. Binaman Aksara
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung:Aflabeta
- Supriyono, R.A, 2020, *Akuntansi Manajemen Konsep Dasar Akuntansi Manajen dan Proses Perencanaan*, Yogyakarta : BPFE
- Trisnawati, N. A., Burhanuddin, & Ferina, I. S. 2019. *Efektivitas Realisasi Dan Serapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Vol. 10 No. 1